

OPTIMALISASI PENGELOLAAN OBJEK PARIWISATA PANTAI BALIRANGGENG OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO

*Novlando Sasahang¹
Sarah Sambiran²
Josef Kairupan³*

Abstrak

Sebagai salah satu daerah destinasi wisata di Sulawesi Utara, Kabupaten Sitaro memiliki banyak obyek wisata yang menarik untuk dikembangkan, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata seni dan budaya atau wisata lainnya. Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa optimalisasi kebijakan pemerintah daerah dalam prioritas pengelolaan kepariwisataan khususnya pantai baliranggeng melalui dukungan alokasi anggaran yang masih minim, sehingga belum mampu memaksimalkan objek wisata yang ada, terlebih dalam dukungan infrastruktur pariwisata, dari segi promosi kepariwisataan juga belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, pamphlet, ataupun pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website, diakibatkan belum tersedianya website khusus yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan, Obyek Pariwisata.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Latar belakang potensi wisata yang ada di Kabupaten SITARO yang belum seluruhnya dikelola secara profesional, maka peranan pemerintah sebagai fasilitator sangat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangan pariwisata tersebut melalui kepemimpinan institusinya bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation). Maka daripada itu pariwisata daerah perlu mendapat perhatian lebih mendalam khususnya aset-aset wisata yang memiliki potensi wisata yang bukan saja bernilai historis melainkan aset wisata yang berpotensi ekonomis. Dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja, maka industri pariwisata dijadikan salah satu sektor andalan dimana pariwisata dianggap sebagai salah satu industri yang menimbulkan efek ganda bagi sektor lainnya. Menjadikan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata andalan diperlukan adanya suatu perencanaan strategi yang baik dan adanya introspeksi terhadap isu/faktor strategis, sehingga dengan adanya strategi yang baik dalam pengembangan sektor pariwisata maka akan meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan demikian dapat mengetahui prospek perkembangan sektor pariwisata daerah kedepannya.

Sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten SITARO, saat ini terdapat potensi alam untuk dijadikan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Baliranggeng, Kecamatan Siau Timur

Selatan, kedua potensi wisata alam ini belum dikelola oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata Kabupaten SITARO, sampai dengan saat ini pengelolaan kedua objek wisata tersebut masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat lokal, dimana fasilitas-fasilitas standart sebagai tempat wisata belum tersedia, sehingga promosi-promosi yang dilakukan hanyalah bersifat lokal, belum diketahui oleh masyarakat yang ada di daerah lain, apalagi oleh turis mancanegara, kendala lainnya adalah kurangnya sarana transportasi, baik darat maupun laut, dimana untuk sarana transportasi darat, infrastruktur jalan yang belum memadai, juga kendaraan yang belum cukup, sebagai daerah kepulauan transportasi laut melalau kapal-kapal yang ada perlu di perbaiki, karena sampai dengan saat ini hanyalah kapal-kapal nelayan yang dijadikan sebagai sarana transportasi laut. Selanjutnya dari pihak masyarakatpun sebenarnya sangat mendukung kedua lokasi ini untuk dikelola lebih baik lagi, agar dapat mendukung perekonomian masyarakat lokal, sesuai dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, bahwa masyarakat berharap pemerintah kabupaten sitaro melalui dinas pariwisata segera memaksimalkan pengelolaan terhadap objek wisata pantai ini.

Hal lainnya pengelolaan objek wisata pantai baliranggeng perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten seperti menyediakan akses jalan masuk ke tempat wisata, sebagaimana kondisi yang ada pada saat ini akses jalan masuk ke lokasi objek wisata masih belum memadai, dimana masih berbentuk jalan setapak belum aspal, jalan masuk tersebut belum memiliki lahan khusus untuk jalan karena masih

harus melalui lahan orang lain, begitu pula dengan penunjuk arah, atau papan informasi yang belum tersedia, hal ini mengakibatkan pengunjung yang datang sedikit kebingungan untuk masuk ke lokasi objek wisata tersebut karena belum tersedianya prasarana jalan dan papan informasi. Hal lainnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perlu ditingkatkan adalah bangunan kazebo tempat berteduh yang ada di lokasi objek wisata sudah mulai rusak, ada beberapa atap kazebo yang sudah mulai bocor, begitu pula dengan dinding yang retak, selain itu perlu dilakukan renovasi serta promosi oleh pihak terkait agar objek wisata pantai baliranggeng dalam pengelolaannya dapat menghasilkan sumber pendapatan bagi daerah serta bagi masyarakat sekitar obyek wisata pantai baliranggeng.

Tinjauan Pustaka

Optimal didefinisikan sebagai sesuatu terbaik, tertinggi, paling menguntungkan (Alwi, 2001). Pradana (2008) menyatakan bahwa optimalisasi atau optimasi adalah salah satu disiplin ilmu dalam matematika yang fokus untuk mendapatkan nilai minimum atau maksimum secara sistematis dari suatu fungsi, peluang, maupun pencarian nilai lainnya dalam berbagai kasus. Optimasi sangat berguna di hampir segala bidang dalam rangka melakukan usaha secara efektif dan efisien untuk mencapai target hasil yang ingin dicapai. Tentunya hal ini akan sangat sesuai dengan prinsip ekonomi yang berorientasikan untuk senantiasa menekan pengeluaran untuk menghasilkan output yang maksimal.

Menurut teori ekonomi, jika suatu variabel sudah mencapai tingkat optimal, ia tidak layak dibuat lebih banyak atau lebih sedikit tanpa

menimbulkan kerugian. Dalam teori produksi, misalnya, tingkat produksi optimal adalah yang menghasilkan keuntungan terbesar. Jika produksi dikurangi, keuntungan akan berkurang, demikian halnya jika produksi ditingkatkan (Anonim, 2007). Pradana (2008) menyatakan bahwa optimalisasi bertujuan untuk melakukan usaha secara efektif dan efisien dalam mencapai target hasil yang ingin dicapai. Ada dua tipe optimalisasi yang dapat dicapai oleh perusahaan yaitu minimisasi biaya (minimize cost) atau maksimisasi profit (maximize profit). Menurut Swanson (1958), optimasi atau optimalisasi harus didefinisikan terlebih dahulu, tergantung dari situasi permasalahan yang dihadapi, karena optimasi bisa berarti minimisasi biaya atau maksimisasi profit. Jadi optimalisasi bertujuan untuk menjamin penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien dalam mencapai minimize cost atau maximize profit.

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "strategia" yang diartikan sebagai "the art of the general" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Halim dalam Rasyad (2003:30) menjelaskan strategi adalah suatu cara dimana organisasi / lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal.

Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 memuat baik cita-cita, dasar-dasar, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Cita-cita pembentukan negara kita kenal dengan istilah tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sektor pariwisata yang sudah mendunia dan menyedot banyak wisatawan mancanegara bahkan lintas negara, juga pada akhirnya mampu menjadi duta bangsa yang mengabarkan pada dunia, eksistensi Bangsa dan Negara Indonesia. Menjadi duta kepada dunia dan mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, aman, kondusif, maju dan sejahtera. Sektor pariwisata ini dapat memberi gambaran wajah Indonesia kepada dunia internasional (Arsyad, 2003:24).

Pariwisata di era otonomi daerah adalah wujud dari cita-cita Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum dalam arti bahwa pariwisata jika di kelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi secara langsung pada masyarakat di sekitar daerah pariwisata, terutama dari sektor perekonomian. Secara tidak langsung pariwisata memberikan kontribusi signifikan kepada PAD suatu daerah dan tentu saja pemasukan devisa bagi suatu Negara. Akibat langsung yang timbul dari pemberian otonomi

daerah adalah adanya daerah basah dan daerah kering. Hal ini disebabkan potensi dan kondisi masing-masing daerah di Indonesia tidak sama. Daerah yang kaya akan sumber daya alam otomatis menjadi daerah basah seiring dengan bertambahnya perolehan PAD-nya dari sektor migas misalnya, sedangkan daerah yang minus sumber daya alam otomatis menjadi daerah kering. Namun demikian tidak berarti daerah yang miskin dengan sumber daya alam tidak dapat meningkatkan PAD-nya, karena jika dicermati ada beberapa potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan dari sektor lain seperti sektor pariwisata. Dalam lingkup nasional, sektor pariwisata dianggap sebagai sektor yang potensial di masa yang akan datang. Menurut analisis World Travel and Tourism Council (WTTC), industri pariwisata menyumbang 9,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada saat ini dan diperkirakan pada tahun 2007 akan meningkat menjadi 10,1%. Jumlah perjalanan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia pada tahun 2004 mengalami pertumbuhan sebesar 19,1% dibanding tahun 2003. Sedangkan penerimaan devisa mencapai US\$ 4,798 miliar, meningkat 18,8% dari penerimaan tahun 2003 sebesar US\$ 4,037 miliar (Marpaung, 2003:21-23).

Kosa kata pariwisata berasal dari kata "pari" yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar dan "Wisata" artinya bepergian atau perjalanan. Jadi, pariwisata berarti suatu kegiatan perjalanan atau bepergian yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, dengan tujuan bermacam-macam. Pada sisi lain Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha

yang terkait di bidang tersebut. Istilah pariwisata dicetuskan oleh Presiden RI, Ir. Soekarno tanggal 14 Juni 1958 dalam penutupan Musyawarah Nasional Tourism II di Gedung Pemuda Surabaya. Presiden menanyakan kata apa yang tepat untuk pengganti *tourisme* kepada Menteri P & K Dr. Pryono. Menteri menjawab, untuk antardaerah/kota dipakai kata *darmawisata* dan untuk antar benua dipakai kata *Pariwisata*. Di dalam makna yang umum kepariwisataan (*tourism*) terambil dari kata *tour* atau perjalanan. Menurut kamus Encarta, *tour-ism* 1. The visiting of places away from home for pleasure. 2. The business of organizing travel and services for people traveling for pleasure.

Metode Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi penyusunan model pengembangan pariwisata pada wilayah administratif Kabupaten Sitaro yang diarahkan dan diharapkan sebagai sentra berbasis wisata, seni dan budaya daerah di Sulawesi Utara, adapun lokasi penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yaitu Strategi Pengembangan Potensi Kepariwisataan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten SITARO, dilakukan pada Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten SITARO Provinsi Sulawesi Utara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan tipe penelitian kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Pada tipe penelitian, ini seseorang atau suatu kelompok yang diteliti permasalahannya, ditelaah secara komprehensif, mendetail dan mendalam, dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini di fokuskan pada optimalisasi pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten SITARO, melalui objek wisata pantai pasir putih balirangeng, di Kecamatan Siau Timur Selatan, yang dikaji melalui aspek-aspek sebagai berikut: kebijakan umum Pemerintah Kabupaten SITARO, yaitu: prioritas pengelolaan pariwisata, anggaran, promosi, kendala, hambatan, tantangan dalam pengelolaan pariwisata; Strategi pengembangan pariwisata.

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan, pegawai dan staf yang mengetahui informasi secara rinci tentang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sitaro. Husaini, dkk (1995;84) menyatakan bahwa dalam penelitian yang bersifat kualitatif tidak dikenal adanya populasi, melainkan yang dikenal hanya sampel yang terdiri dari responden yang ditentukan secara purposivesesuai dengan tujuan penelitian, dimana yang menjadi responden hanya sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- Seksi Bidang Usaha Pariwisata
- Seksi Bidang Pengembangan Kawasan Wisata

- Seksi Bidang Pemasaran dan Penyuluhan Wisata
- Masyarakat lokal: Masyarakat Pengunjung, masyarakat Pengelola

Hasil Penelitian

Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah dan pelestarian obyek dan daya tarik wisata Potensi obyek dan daya tarik wisata (ODTW) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang tersebar di 18 kecamatan diperlukan penanganan yang profesional dari stakeholder. Terutama untuk kawasan pengembangan destinasi, seperti untuk kawasan obyek wisata sejarah dan purbakala di kecamatan Siau Barat Utara sebagai daerah destinasi dan Kecamatan Tagulandang daerah obyek pariwisata unggulan, seperti yang termuat dalam Renstra 2005-2010 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Penataan sumber daya yang dijadikan daya tarik wisata, objek wisata dan kawasan wisata agar terlihat lebih menarik dan pengeloalaanya lebih profesional sehingga mampu bersaing dengan destinasi-destinasi pariwisata lainnya di Sulawesi Utara, oleh karena itu, penataan dan pemeliharaan obyek-obyek wisata perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Maka diperlukan upaya-upaya dengan pengelolaan yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang menyatakan bahwa: “dalam rangka menemukenali dan mengembangkan ODTW perlu segera dilaksanakan inventarisasi terhadap potensi daerah ODTW yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro secara bertahap sesuai prioritas dengan memperhatikan nilai keunggulan saing dan keunggulan

banding, serta kekhasan obyek wisata tersebut”

Keadaan potensi Sumber Daya berupa potensi ODTWA yang ada merupakan modal dasar sebagai kekuatan yang dapat dijadikan produk pariwisata yang lebih berkembang secara lestari yang merupakan kekhasan seni dan budaya tradisional yang dapat mendukung pengembangan pariwisata, maka usaha pengembangan pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diarahkan pada usaha-usaha pengelolaan pariwisata berkualitas yang memerlukan perbaikan realitas.

Aspek Peran Serta Masyarakat melalui kesempatan-kesempatan usaha sehingga ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan mekanisme pola jaringan kemitraan masyarakat dan pengembangan peran serta aktif serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata setempat. Dalam usaha pengembangan kebudayaan dan Pariwisata di daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, keterlibatan hubungan kemitraan stakeholder yang berbasis kerakyatan saat ini belum optimal. Oleh karena pengembangan usaha pariwisata dan budaya diarahkan kepada adanya kebersamaan dan kesadaran dalam pengembangan suatu kawasan usaha wisata, dan nilai-nilai kebudayaan dan peninggalannya. Di dalam pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat, maka kebijakan pengembangan yang dilakukan diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, salah satu strategi adalah bagaimana memberdayakan budaya lokal, mutu lingkungan dan memberdayakan kreativitas masyarakat.

Dengan melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal, maka akan lebih terjamin kesesuaian program pengembangan dengan aspirasi masyarakat setempat serta bagaimana membuat suatu kawasan wisata yang mampu membuka peluang pelibatan aktif masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan industri pariwisata.

Seperti keterangan yang diungkapkan oleh masyarakat yang ada di Pantai Kalihiang, Ibu Miske. A. Daling yang menyatakan: sampai saat ini di pantai kalihiang belum ada prioritas pembangunan pariwisata yang dilakukan Pemkab Sitaro, karena tidak ada dana untuk pengelolaan pariwisata yang ada. Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai kalihiang mendukung apabila pantai kalihiang dikelola dan dikembangkan pariwisata yang ada karena sesuai dengan visi dan misi kampung kalihiang yaitu menjadikan kampung kalihiang sebagai kampung wisata. Budaya lokal yang ada mendukung dengan dikelolanya dan dikembangkan objek wisata pantai kalihiang, yang berada di desa kalihiang". Begitu pula masyarakat yang ada di pantai Balirangeng, Bpk. Erwin Bantung, yang mengatakan bahwa: Pemkab Sitaro sudah melakukan prioritas pembangunan tempat wisata yaitu dengan pembuatan patung Tuhan Yesus dipantai balirangeng yang sampai saat ini masih terus dikembangkan. Masyarakat yang tinggal disekitar pantai balirangeng mendukung apabila dikelola dan dikembangkan pariwisata yang ada karena sesuai dengan usulan masyarakat dipantai balirangeng juga mo dibangun rumah makan terapung yang bisa terekspose keluar daerah dan boleh mo datangkan para wisatawan domestik dan juga termasuk wisatawan asing. Budaya lokal yang ada mendukung dengan dikelola dan

dikembangkan objek wisata yang ada karena tempat yang ada di ujung siau timur selatan harus dibangun tempat wisata dan kedepannya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat yang tinggal disekitar pantai kalihiang ketimbang mo iko CPNS yang nda mo lulus".

Banyak potensi masyarakat yang bisa diberdayakan dan diangkat. Potensi yang dikembangkan berdasarkan kemampuan masyarakat dengan kreasi budayanya. Dengan demikian, berbagai terobosan atau inovasi dalam pengembangan pariwisata ini akan memberikan nilai terhadap pengembangan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah pengembangan masyarakat, wilayah, dan selanjutnya perlu didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal
- b) Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal
- c) Berorientasi pada pengembangan wiraswasta berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja tinggi dan berorientasi pada teknologi kooperatif
- d) Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif seminim mungkin
- e) Menciptakan suatu produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pariwisata yang berbekal modal budaya untuk memperoleh kemandirian dan kesejahteraan ekonomi sendiri.

Hal itu menuntut adanya perhatian yang lebih dari para pengambil

kebijakan sektor pariwisata untuk mempertimbangkan kembali pola pengembangan kawasan wisata agar masyarakat sekitar lebih dapat merasakan manfaatnya. Dengan kata lain bagaimana membuat suatu kawasan wisata yang mampu membuka peluang melibatkan aktif masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan industri pariwisata bukan hanya sekedar sebagai obyek.

Kesimpulan

1. Optimalisasi pengelolaan objek wisata pantai Baliranggeng di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum maksimal, hal ini dibuktikan melalui hasil penelitian sebagai berikut:
2. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam prioritas pengelolaan kepariwisataan khususnya pantai baliranggeng melalui dukungan alokasi anggaran yang masih minim, sehingga belum mampu memaksimalkan objek wisata yang ada, terlebih dalam dukungan infrastruktur pariwisata.
3. Promosi Kepariwisataan yang belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, pamphlet, ataupun pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website, diakibatkan belum tersedianya website khusus yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Anime Positif masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata di pantai Kalihiang dan Baliranggeng, lamban direspon oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, khususnya Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata, dimana sampai dengan saat ini belum dikelola secara khusus, baik oleh pemerintah, maupun pihak swasta.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro diharapkan menambah alokasi anggaran dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada, untuk menunjang pembangunan infrastruktur kepariwisataan, khususnya lokasi wisata pantai Kalihiang dan Baliranggeng.
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu meningkatkan promosi kepariwisataan, bukan hanya melalui stiker, brosur, pamphlet, atau mengikuti pameran, tetapi lebih kepada promosi internasional untuk wisatawan mancanegara.
3. Respect pemerintah harus lebih ditingkatkan dalam menyambut sikap positif masyarakat dalam mendukung dikembangkannya kepariwisataan yang ada di Kepulauan Sitaro.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji, 2000 *Manajemen Bisnis*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arsyad, Azhar, 2003. *Manajemen Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan & Eksekutif, Manajemen Strategik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bryson, John M., *Perencanaan Strategis untuk Organisasi Publik dan Nirlaba: Sebuah Panduan untuk Memperkuat dan Mempertahankan Prestasi Organisasi*, rev. ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 1999).
- Dirgantoro, Crown, 2001. *Manajemen Strategik Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Jakarta : Gramedia.
- Hari Purnomo, Setiawan & Zulkiefli Manysah. 2007. *Manajemen*

- Strategi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Haris, Amirullah, dan Budiyo, 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L., 2003. Manajemen Strategis. Andi Yogyakarta.
- Karyoso. 2005. Manajemen Perencanaan dan Penganggaran. Jakarta : PTK Press dan Restu Agung.
- Lundberg, D.E., M.H. Stavenga, M. Krishnamoorthy. 1997. Ekonomi Pariwisata. dalam: I Wayan Geriya, Diplomasi Keunggulan Budaya. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Manulang M. 2001. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Marpaung Happy. 2004. Pengetahuan Kepariwisata. Bandung : Alfabeta.
- Marpaung Happy dan Herman Bahar. 2002. Pengantar Pariwisata. Bandung : Alfabeta
- Nisjar, Kahri & Winardi. 1997. Manajemen Strategik. Bandung : Mandar Maju
- PB, Triton. 2007. Manajemen strategis, Terapan Perusahaan dan Bisnis. Tugu. Yogyakarta.
- Pendit Nyoman S. 2002. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar. Jakarta : Pradnya Paramita
- UU RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata tentang Pembangunan Kepariwisata (pasal 6)
- UU No 10 tahun 2009 Tentang Kawasan Strategis
- PP No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.